

Request for partial data mainstreaming: Indonesia

For decision

Ringkasan

Penilaian Sekretariat Internasional adalah bahwa permintaan Indonesia untuk pengarusutamaan data sebagian memenuhi persyaratan untuk menyimpang dari prosedur standar sebagaimana diatur dalam Persyaratan 4.9 (b). Multi-Stakeholder Group (MSG) mampu mengatasi (i) alasan penyimpangan dari prosedur standar; (ii) apakah ada pengungkapan rutin atas data yang disyaratkan oleh Standar EITI secara rinci yang dipersyaratkan; (iii) apakah data keuangan tunduk pada audit independen yang kredibel, menerapkan standar internasional, dan (iv) apakah ada penyimpanan data historis yang memadai.

MSG Indonesia menyetujui peta jalan pengarusutamaan data parsial pada November 2021. Studi ini mengkategorikan data yang diungkapkan secara sistematis di negara ini menjadi 3 kategori, yaitu (i) data yang diarusutamakan sebagian dengan keterbatasan minor (ii) data yang diarusutamakan sebagian dengan keterbatasan utama dan (iii) data yang diarusutamakan tidak diarusutamakan karena hambatan yang signifikan.

Sekretariat merekomendasikan agar Komite Pelaksana merekomendasikan kepada Dewan persetujuan atas permintaan pengarusutamaan data sebagian Indonesia sehubungan dengan persyaratan yang telah diidentifikasi sebagai pengarusutamaan sebagian dengan keterbatasan minor. Sehubungan dengan data yang sebagian diarusutamakan dengan keterbatasan utama, dan yang tidak diarusutamakan karena hambatan yang signifikan, MSG diharapkan untuk mematuhi peta jalan pengarusutamaannya dalam bekerja towards eventual full mainstreaming of

these Persyaratan.

Sambil menunggu implementasi roadmap pengarusutamaan, Indonesia masih diwajibkan untuk mengungkapkan kontrak sesuai dengan Persyaratan 2.4. Sehubungan dengan pengungkapan Beneficial Ownership, Indonesia diwajibkan untuk mengungkapkan Beneficial Owner sesuai dengan Persyaratan 2.5. dan bekerja untuk memperkuat daftar yang ada dan memastikan akses publik ke data.

Lebih lanjut direkomendasikan bahwa kepatuhan terhadap keputusan Dewan ini di bawah pendekatan arus utama dinilai selama Validasi berikutnya, termasuk Validasi EITI Indonesia berikutnya pada April 2023. Direkomendasikan agar Dewan mendorong EITI Indonesia untuk lebih memperkuat upaya pengungkapan sistematis.

Assessment of request for partial data mainstreaming: Indonesia

Daftar isi

Rekomendasi.....	Error! Bookmark not defined.
Latar belakang.....	Error! Bookmark not defined.
Aturan dan preseden yang relevan	4
Penilaian atas permintaan Indonesia untuk pengarusutamaan data parsial.....	5
Lampiran A: Ringkasan temuan Studi Kelayakan dan peta jalan pengarusutamaan MSG.....	12

Dokumentasi pendukung

Surat permohonan pengarusutamaan sebagian data EITI Indonesia [dapat diakses disini](#)

Studi kelayakan pengarusutamaan EITI Indonesia [dapat diakses disini](#)

Apakah kompetensi EITI untuk setiap tindakan yang diusulkan telah dipertimbangkan?

Prosedur yang disepakati untuk pengungkapan yang diarusutamakan mengamankan Dewan EITI untuk meninjau permintaan pengungkapan yang diarusutamakan.

Implikasi keuangan dari setiap Tindakan

Tidak ada implikasi finansial atas keputusan ini terkait dengan biaya yang harus ditanggung Dewan EITI atau Sekretariat Internasional. Persetujuan atas permintaan tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya terkait penerapan EITI di Indonesia.

Sejarah dokumen

Disampaikan pada Implementation Committee

9 Agustus

Didiskusikan oleh Implementation Committee	16 Agustus
Disetujui oleh Implementation Committee	DATE

A. Rekomendasi

Sekretariat merekomendasikan agar Komite Pelaksana membuat rekomendasi berikut kepada Dewan:

Dewan EITI menerima permintaan kelompok multi-stakeholder EITI Indonesia untuk implementasi pengarusutamaan data sebagian. Standar EITI 2019 mendorong negara-negara pelaksana untuk menerapkan pengungkapan sistematis (Bagian 8). Seperti yang ditunjukkan dalam peta jalan pengarusutamaan, kelompok multi-stakeholder (MSG) akan bekerja dengan kementerian terkait untuk memperkuat pengungkapan sistematis rezim hukum dan fiskal (Persyaratan 2.1), daftar lisensi (Persyaratan 2.3) data eksplorasi (Persyaratan 3.1), data produksi (Persyaratan 3.2), data ekspor (Persyaratan 3.3), transportasi (Persyaratan 4.4), distribusi pendapatan (Persyaratan 5.1), transfer daerah (Persyaratan 5.2), pengeluaran kuasi fiskal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Persyaratan 6.2) dan kontribusi terhadap ekonomi (Persyaratan 6.3). Data ini sebagian telah diarusutamakan tetapi akan membutuhkan perbaikan lebih lanjut. MSG diharapkan untuk mematuhi peta jalan pengarusutamaannya dalam bekerja menuju pengarusutamaan penuh persyaratan ini.

Laporan EITI Tahunan akan terus diproduksi untuk memperkuat pengungkapan sistematis partisipasi negara (Persyaratan 2.6), transaksi yang terkait dengan BUMN (Persyaratan 4.5), alokasi kontrak dan lisensi (Persyaratan 2.2), pengeluaran sosial dan lingkungan (Persyaratan 6.1), dampak lingkungan (Persyaratan 6.4), pembayaran subnasional (Persyaratan 4.6) dan untuk mengungkapkan data pajak dan pendapatan (Persyaratan 4.1), kontrak (Persyaratan 2.4), Beneficial Ownership (Persyaratan 2.5) dan penjualan bagian produksi negara (Persyaratan 4.2). MSG diharapkan untuk mematuhi peta jalan pengarusutamaannya dalam bekerja menuju pengarusutamaan penuh persyaratan ini.

Sambil menunggu implementasi peta jalan pengarusutamaan, Indonesia masih diwajibkan untuk mengungkapkan kontrak sesuai dengan Persyaratan 2.4. Sehubungan dengan pengungkapan Beneficial Ownership, Indonesia diwajibkan untuk mengungkapkan Beneficial Owner sesuai dengan Persyaratan 2.5, dan berupaya memperkuat daftar yang ada dan memastikan akses publik ke data.

Dalam mengambil keputusan ini, Dewan EITI mencatat bahwa EITI Indonesia akan terus meningkatkan kepatuhan terhadap Persyaratan EITI teknis seperti kelengkapan (Persyaratan 4.1), pemilahan data tingkat proyek (Persyaratan 4.7) dan kualitas dan jaminan data (Persyaratan 4.9).

Dewan EITI memuji dan menyambut baik komitmen dari pemerintah dan kelompok multi-stakeholder untuk terus mengawasi dan meninjau pelaksanaan pengarusutamaan data parsial ini untuk memastikan bahwa itu sejalan dengan Standar EITI.

B. Latar Belakang

Sektor ekstraktif memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, sebesar 8,08% dari PDB, memberikan kontribusi 9,29% dari pendapatan dan 22% dari ekspor¹. Sebagai bagian dari kebijakan Satu Data Indonesia, Indonesia telah mengambil langkah untuk mengungkapkan data ekstraktif melalui platform online yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia termasuk portal e-tender, ESDM One Map, portal geospasial dan lain-lain. Kebijakan keseluruhan adalah untuk membuat platform yang disebut perusahaan data ESDM yang akan mengintegrasikan data energi dan mineral ke dalam satu sistem, membuat data dapat dioperasikan dan dapat diakses publik. Kebijakan nasional ini sejalan dengan Standar EITI 2019 yang mendorong negara-negara pelaksana EITI untuk menerapkan data mainstreaming atau pengungkapan sistematis. Dalam rangka penerapan pengungkapan sistematis Indonesia EITI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Studi kelayakan pengarusutamaan selesai pada Juli 2021. Rekomendasi studi ini digunakan oleh MSG untuk mengembangkan peta jalan pengarusutamaan data parsial..
- b) Pada November 2021, MSG menyetujui peta jalan pengarusutamaan data parsial
- c) Pada tanggal 25 April 2022, MSG mengajukan permintaan untuk pengarusutamaan sebagian data kepada Dewan.

Permintaan untuk mengarusutamakan sebagian data menunjukkan rencana yang jelas untuk mengatasi kesenjangan yang diidentifikasi dalam studi kelayakan. MSG telah mengindikasikan rencana untuk mengawasi kemajuan implementasi peta jalan dan melakukan tinjauan tahunan atas kemajuan implementasinya.

C. Aturan dan preseden yang relevan

Prosedur yang disepakati untuk pengungkapan² yang diarusutamakan menguraikan tujuh fase bagi negara-negara pelaksana EITI untuk menerapkan pengungkapan yang diarusutamakan yang meliputi (1) komitmen, (2) kelayakan, (3) rencana kerja, (4) aplikasi, (5) persetujuan, (6) implementasi dan tinjauan pelaporan, (7) .

EITI Indonesia telah menyelesaikan fase 1-4 sebagaimana tercantum dalam prosedur yang disepakati untuk pengungkapan arus utama, dengan permintaan pengarusutamaan data sebagian untuk persetujuan Dewan pada April 2022.

Permintaan serupa untuk pengarusutamaan data dibuat oleh EITI Norwegia pada tahun 2017 dan diterima oleh Dewan pada Oktober 2017³. Namun, tidak seperti permintaan EITI Norwegia yang mencakup pengarusutamaan penuh EITI, EITI Indonesia meminta pengarusutamaan data sebagian karena masih ada hambatan administratif dan hukum, termasuk ketentuan kerahasiaan tentang pajak dan kontrak serta kesenjangan dalam tingkat pemilahan

¹ Indonesia EITI page accessed at [Indonesia | EITI](#)

² Accessed at [Agreed upon procedure for mainstreamed disclosures | EITI](#)

³ Board Decision 2017-49, accessed at [The Board accepted Norway's mainstreaming request and adapted implementation request. | EITI](#)

D. Penilaian atas permintaan Indonesia untuk pengarusutamaan data parsial

Sekretariat telah menilai permintaan EITI Indonesia sesuai dengan prosedur yang disepakati untuk pengungkapan arus utama.

Tabel 1 – Penilaian usulan Indonesia untuk pengarusutamaan data parsial berdasarkan prosedur yang disepakati untuk pengungkapan pengarusutamaan

Kreteria	Penilaian Sekretariat
1. Komitmen dari pemerintah dan kesepakatan MSG untuk mengeksplorasi pendekatan penerapan Standar EITI ini	<p>Terdapat kerangka kebijakan nasional yang jelas yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap data yang terintegrasi dan terbuka melalui Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.⁴</p> <p>Perpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan praktik pengelolaan data dengan memperjelas peran dan tanggung jawab setiap lembaga pemerintah dalam pengumpulan, pengolahan, dan pengungkapan data sesuai dengan praktik terbaik internasional. Hal ini juga memberikan panduan penyebaran data sesuai dengan prinsip interoperabilitas. Peraturan tersebut melengkapi komitmen MSG untuk mengarusutamakan dan menyediakan kerangka peraturan bagi EITI Indonesia untuk menerapkan pengungkapan yang diarusutamakan. In addition,</p> <p>Komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan juga tercermin dalam keterlibatan aktif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia dan kelompok multi-stakeholder dalam menyusun studi kelayakan pengarusutamaan, dan dalam mengembangkan dan menyetujui peta jalan⁵ pengarusutamaan data. Studi kelayakan menunjukkan bahwa lebih dari 70% Persyaratan EITI yang berlaku telah diungkapkan secara sistematis oleh pemerintah meskipun dengan beberapa keterbatasan⁶. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pemerintah</p>

⁴ Presidential Regulation no. 39, 2019. accessed at [PERPRES No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia \[JDIH BPK RI\]](#)

⁵ MSG meeting notes on 30 July 2021, accessed at [Microsoft Word - 210507 - MoM MSG Meeting rev FK.docx \(esdm.go.id\)](#) and MSG meeting notes on 10 November 2021 accessed at [211110-MoM-MSG-Meeting v4-fnl.docx \(esdm.go.id\)](#)

⁶ Feasibility Study, July 2021. accessed at [Indonesia EITI Mainstreaming Feasibility Study.pdf \(esdm.go.id\)](#)

	berkomitmen untuk mengarusutamakan data ekstraktif.
2. Kelayakan – penilaian ketat terhadap kelayakan pengungkapan yang diarusutamakan oleh badan independen dan kompeten secara teknis sesuai dengan kerangka acuan kerangka yang disetujui Dewan	<p>MSG, dengan dukungan dari Bank Dunia dan Sekretariat Internasional EITI, menggunakan jasa konsultan untuk melakukan studi kelayakan yang ketat sesuai dengan persyaratan template yang disepakati Dewan reference.⁷</p> <p>Studi⁸ yang dilakukan antara tahun 2019-2021 ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang keterbukaan informasi rutin oleh instansi pemerintah dan pengungkapan perusahaan berdasarkan Standar EITI.</p> <p>A. Ada pengungkapan rutin sebagian besar data yang disyaratkan oleh Standar EITI, dalam detail yang diperlukan sebagaimana ditentukan oleh Persyaratan 4.9 (b). Temuan umum dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar data yang disyaratkan oleh Standar EITI 2019 telah diungkapkan secara sistematis di situs web pemerintah.</p> <p>Studi ini mengkategorikan data yang diperlukan berdasarkan Standar EITI menurut tingkat kesiapannya untuk pengarusutamaan berdasarkan tinjauan situs web pemerintah Indonesia. Tiga kategori yang digunakan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data yang diarusutamakan sebagian dengan keterbatasan minor: Sekretariat memahami bahwa ini mengacu pada data yang saat ini diarusutamakan sebagian di situs web pemerintah di mana kesenjangan dapat dengan mudah diatasi karena informasi tersedia atau dapat dengan mudah disediakan dari lembaga. Pengungkapan tidak terhalang oleh hambatan praktis atau hukum yang signifikan. Studi ini menemukan bahwa untuk data non-pendapatan, ada tujuh persyaratan yang sebagian diarusutamakan dengan keterbatasan minor. Untuk data pendapatan, satu persyaratan diarusutamakan sepenuhnya, dan tiga persyaratan diarusutamakan sebagian

⁷ Board Agreed Template Terms of Reference accessed at [tor-mainstreaming-feasibilitystudy.docx \(live.com\)](https://www.eiti.org/tor-mainstreaming-feasibilitystudy.docx)

⁸ Feasibility Study, accessed at Indonesia EITI Mainstreaming Feasibility Study.pdf (esdm.go.id)

	<p>dengan keterbatasan kecil⁹. MSG telah menyepakati pendekatan untuk mengatasi kesenjangan¹⁰ dan tiga diurusutamakan sebagian dengan keterbatasan kecil¹¹ ini seperti yang ditunjukkan dalam peta jalan pengarusutamaan yang dikembangkan oleh MSG, ringkasannya diberikan dalam Lampiran A..</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data yang diurusutamakan sebagian dengan keterbatasan utama: Sekretariat memahami bahwa ini mengacu pada data yang saat ini diurusutamakan sebagian di situs web pemerintah tetapi ada celah karena lembaga tidak secara teratur menghasilkan data di luar proses EITI, atau tidak ada peraturan yang mengharuskan mereka untuk mengungkapkan data. Sementara beberapa hambatan hukum atau praktis ada untuk persyaratan ini, studi ini menemukan bahwa hambatan ini tidak signifikan sehingga memerlukan reformasi jangka panjang. Oleh karena itu, kesenjangan informasi biasanya diatasi melalui Laporan EITI. Untuk data non-pendapatan, dua persyaratan diurusutamakan sebagian dengan keterbatasan utama¹². Untuk data pendapatan, tiga persyaratan diurusutamakan sebagian dengan keterbatasan utama¹³. MSG telah menyepakati pendekatan untuk mengatasi kesenjangan ini seperti yang ditunjukkan dalam peta jalan pengarusutamaan yang dikembangkan oleh MSG, ringkasannya
--	---

⁹These seven requirements are legal framework and fiscal regime (Requirement. 2.1), license register (Requirement 2.3), exploration, production, and export data (Requirements 31-33), distribution of revenues (Requirements 5.1) and contribution of extractive sector to the economy (Requirement 6.3).

¹⁰ Transportation revenue (Requirement 4.4)

¹¹ These are infrastructure provision and barter arrangement (Requirement. 4.3), subnational transfer (Requirement. 5.2) and quasi fiscal expenditure (Requirement. 6.2)

¹² These are license allocation (Requirement. 2.2) and state participation (Requirement. 2.6)

¹³ These are transactions related to SOEs (Requirement. 4.5), subnational payments (Requirement 4.6) and social & environmental expenditure (Requirement 6.1)

	<p>diberikan dalam Lampiran A..</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak diarusutamakan karena hambatan hukum dan administratif yang signifikan: Sekretariat memahami bahwa ini mengacu pada data yang tidak dapat diungkapkan kepada publik karena ketentuan kerahasiaan, baik dalam undang-undang/peraturan atau kontrak atau karena kekhawatiran tentang kepekaan komersial. Studi ini menemukan bahwa untuk data non-pendapatan, dua persyaratan memiliki keterbatasan hukum dan administratif ¹⁴yang signifikan. Untuk data pendapatan, dua persyaratan memiliki keterbatasan hukum dan administratif ¹⁵¹⁶yang signifikan. MSG telah menyepakati pendekatan untuk mengatasi kesenjangan ini seperti yang ditunjukkan dalam peta jalan pengarusutamaan yang dikembangkan oleh MSG, ringkasannya diberikan dalam Lampiran A. <p>B. Data keuangan tunduk pada audit independen yang kredibel, menerapkan standar internasional. Dalam hal kepatuhan terhadap EITI Requirement 4.9, laporan keuangan oleh perusahaan dan entitas pemerintah telah sesuai dengan International Standards on Auditing (ISA) dan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI). Semua data keuangan pemerintah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK adalah anggota Organisasi Internasional Lembaga Pemeriksa Keuangan (INTOSAI) dan standar auditnya mengikuti ISSAI. Misalnya, dalam penilaian Pengeluaran Publik dan Akuntabilitas Keuangan (PEFA) 2018, Indonesia memperoleh skor A untuk cakupan audit dan dimensi standar. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa standar audit nasional</p>
--	---

¹⁴ These are contract disclosure (Requirement. 2.4) and beneficial ownership (Requirement. 2.5)

¹⁵ These are comprehensive disclosure of taxes and revenues (Requirement 4.1) and sale of state share (Requirement 4.2)

¹⁶ Partially mainstreamed with minor limitation means that these data have been systematically disclosed but there are gaps in the technical requirements such as public accessibility, comprehensiveness, level of disaggregation, reliability and timeliness which are easier to address. Partially mainstreamed with major limitation means that these data have been systematically disclosed but technical requirements are more difficult to address due to existing administrative and legal barriers. Significant legal and administrative limitations means that these data are not currently disclosed systematically due to existing administrative and legal barrier.

	<p>Indonesia sejalan dengan ISSAI.¹⁷</p> <p>Namun, studi kelayakan juga menemukan bahwa tidak semua perusahaan swasta secara konsisten mengungkapkan laporan keuangan yang telah diaudit. Perlu dicatat bahwa undang-undang perusahaan Indonesia hanya mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan laporan keuangan¹⁸ mereka yang telah diaudit. Untuk mengatasi kesenjangan ini, MSG setuju untuk mengadopsi rekomendasi dari studi kelayakan kualitas data, khususnya:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Untuk migas: Regulator migas SKK Migas harus mewajibkan Laporan Keuangan Triwulanan secara berkala disertai dengan publikasi atau lampiran laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit, di samping pengajuan pembayaran kepada pemerintah.</u>• <u>Laporan Keuangan Triwulanan yang disampaikan oleh perusahaan migas kepada SKK Migas akan tetap dimasukkan dalam laporan SKK Migas sektor migas kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Keuangan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan audit dipublikasikan di situs web Kementerian Keuangan.</u>• <u>MSG harus membuat dan mempublikasikan ringkasan tinjauannya atas opini/hasil laporan audit tahunan untuk kementerian dan lembaga sektor ekstraktif.</u>• <u>Untuk perusahaan pertambangan: Meskipun laporan audit keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada perusahaan pertambangan besar disampaikan ke Kementerian Keuangan setiap tahun, audit keuangan ini tidak diungkapkan kepada publik. Untuk mengatasi kesenjangan ini, MSG berencana untuk bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, BPK, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan kualitas data di sektor pertambangan pada tahun 2023 sebagaimana</u>
--	---

¹⁷ Details are available on the Feasibility Study page 47, accessed at [Indonesia EITI Mainstreaming Feasibility Study.pdf \(esdm.go.id\)](#)

¹⁸ Article 68 of the Indonesia's Company Law no. 40, 2007, accessed at [Indonesian Company Law No. 40 Year 2007 - \[DOC Document\] \(vdocument.in\)](#)

	<p><u>tercermin dalam peta jalan pengarusutamaan data parsial MSG. MSG akan terus mendorong perusahaan pelapor swasta untuk mempublikasikan laporan keuangan mereka yang telah diaudit di situs web mereka sendiri.¹⁹</u></p> <p>C. Ada cukup penyimpanan data historis Data keuangan semua entitas pemerintah telah tersedia di situs web Kementerian Keuangan sejak tahun 2004 dan dapat diakses²⁰ oleh publik. Laporan keuangan audit historis perusahaan pertambangan, minyak dan gas terus tersedia untuk umum bagi perusahaan yang menerbitkan laporan²¹ tersebut. Data pertambangan perizinan, produksi, pengolahan mineral, ekspor, investasi, penerimaan negara, dan bagi hasil tersedia dari tahun 2013-2022 di website²² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini. Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyimpan data historis produksi minyak dan gas bumi dari tahun 1996 – 2020²³ serta produksi batu bara dan mineral dari tahun 1996 – 2020.²⁴</p>
<p>3. Rencana kerja – Kesepakatan MSG tentang jadwal pengungkapan dan jaminan, termasuk pengembangan kapasitas dan bantuan teknis</p>	<p>MSG menyetujui peta jalan pengarusutamaan data parsial untuk 2021-2023 pada 21 November setelah menjalani beberapa putaran konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Peta jalan ini akan ditinjau setiap tahun untuk menilai kemajuan yang dibuat terhadap rencana dan membuat penyesuaian yang diperlukan.</p> <p>Peta jalan tersebut mencakup rencana untuk mengatasi kendala kapasitas serta kesenjangan teknis dan hambatan peraturan. Hal ini juga mencerminkan rekomendasi dari validasi terbaru pada tahun 2019.</p> <p>Sorotan dari peta jalan tersebut meliputi: transisi ke format data terbuka untuk data eksplorasi dan produksi (Persyaratan 3.1 dan 3.2), pengungkapan hukum secara teratur (Persyaratan 2.1), rencana untuk mengatasi</p>

¹⁹ This is reflected in the Feasibility Study page 48. Recommendations of the Feasibility Study are fully adopted by the MSG. Further information can be accessed at [Indonesia EITI Mainstreaming Feasibility Study.pdf \(esdm.go.id\)](#)

²⁰ Accessed at [Laporan Keuangan Pemerintah Pusat \(kemenkeu.go.id\)](#)

²¹ For instance, historical data of PT. Pertamina's audited financial reports have been available since 2006. Accessed at [Publikasi Laporan Tahunan | Pertamina. The same practice also applies to PT. Antam, PT. Bukit Asam, PT. Timah, PT. Perusahaan Gas Negara \(PGN\) and other public companies.](#)

²² Accessed at [MODI \(esdm.go.id\)](#)

²³ This is aggregate data not by project. Accessed at [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](#)

²⁴ Production volume by commodity. Accessed at [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](#)

	<p>masalah pemilahan (Persyaratan 3.2 dan 4.2), pengumpulan dan menerbitkan data tambahan dari entitas pelapor (Persyaratan 2.3, 2.2 dan 6.2), antarmuka dengan laporan tahunan BUMN dan perusahaan (Persyaratan 4.5, 2.6, 4.1 dan 6.1), melakukan diskusi teknis dan konsultasi untuk mengatasi hambatan hukum (Persyaratan 2.4 dan 2.5).</p> <p>Peta jalan tersebut juga mengidentifikasi rencana untuk mengatasi masalah kualitas data bagi perusahaan yang tidak secara konsisten mengungkapkan laporan keuangan yang diaudit.</p>
<p>4. Aplikasi – Aplikasi yang disetujui MSG ke Dewan EITI yang meminta persetujuan rencana kerja yang diusulkan</p>	<p>Setelah pertemuan MSG pada 8 Februari²⁵ untuk membahas dan menyetujui rencana kerja MSG 2022-2023, MSG mengajukan permohonan pengarusutamaan data sebagian kepada Dewan EITI pada 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Ketua MSG, Ego Syahrial, Sekretaris Jenderal ESDM .</p> <p>Surat tersebut menjelaskan alasan permintaan tersebut, yaitu menjadikan transparansi sektor ekstraktif sebagai fitur integral dan rutin dari sistem manajemen informasi pemerintah Indonesia sejalan dengan reformasi e-governance nasional yang sedang berlangsung.</p>

²⁵ MSG meeting minutes, 8 February, accessed at 220208-MoM-MSG-Meeting_3.pdf (esdm.go.id)

Lampiran A: Ringkasan temuan Studi Kelayakan dan peta jalan pengarusutamaan MSG

- Data non-pendapatan

Persyaratan	Temuan studi kelayakan	Rencana MSG
2.1. Kerangka hukum	Diarusutamakan sebagian, keterbatasan kecil	<p>- Publikasikan landasan hukum industri ekstraktif (sektor migas dan minerba) yang terintegrasi dengan jdih.esdm.go.id dengan menambahkan search tools by keyword di Portal EITI</p> <p>-Publikasikan landasan hukum terkait kebijakan fiskal industri ekstraktif (sektor migas, minerba, dan batubara) yang terintegrasi dengan jdih.kemenkeu.go.id dengan menambahkan search tools by keyword di Portal EITI</p>
2.2. Alokasi lisensi	Diarusutamakan sebagian, keterbatasan utama	<p>- Menampilkan proses, kriteria teknis dan finansial peserta lelang dan tahapan lelang di web e-auction</p> <p>- Menampilkan daftar perusahaan peserta dan pemenang lelang sektor minerba di web dan lelang minerba</p>
2.3. Daftar lisensi	Diarusutamakan sebagian, keterbatasan kecil	- Data perusahaan untuk lelang ditampilkan di situs web lelang elektronik pada setiap tahap lelang
2.4. Pengungkapan kontrak	Batasan hukum dan administratif yang signifikan	- Kurangi risiko dengan meninjau pasal-pasal dalam kontrak dan lakukan uji bahaya konsekuensial untuk setiap risiko yang dirasakan. Ini adalah upaya menuju pengungkapan penuh kontrak
2.5. Kepemilikan yang	Batasan hukum dan	- Bantuan Teknis dari program

menguntungkan	administratif yang signifikan	Opening Extractive di bidang verifikasi data BO untuk meningkatkan kualitas data. - Meningkatkan sharing data antar K/L dalam satu sistem aplikasi AHU
2.6. Partisipasi negara	Diurusutamakan sebagian, keterbatasan utama	-Kementerian BUMN menampilkan ringkasan deskripsi hubungan keuangan antara BUMN/Pemerintah di website -BUMN bergabung dalam jaringan transparansi BUMN EITI, untuk terlibat dengan BUMN ekstraktif lainnya di negara-negara pelaksana EITI.
3.1. Eksplorasi	Diurusutamakan sebagian, keterbatasan kecil	- Statistik Potensi Mineral dan Batubara menurut kabupaten atau kota akan disajikan dalam format open data -Statistik Wilayah Kerja Migas Konvensional dan Non-Konvensional secara konvensional, cadangan dan sumur akan disajikan dalam format data terbuka
3.2. Data produksi	Diurusutamakan sebagian, keterbatasan kecil	- Produksi mineral dan batubara (volume nasional) akan diterbitkan per provinsi -Produksi minyak dan gas (volume nasional) akan dipublikasikan per perusahaan
3.3. Ekspor data	Diurusutamakan sebagian, keterbatasan kecil	- Ekspor per KODE HS (8 digit) akan dipublikasikan dalam format data terbuka
5.1. Distribusi pendapatan	Diurusutamakan sebagian, keterbatasan kecil	- Menelusuri alokasi penerimaan negara melalui alokasi Dana Bagi Hasil di tingkat Kabupaten atau

		Kota dan anggaran provinsi.
6.3. Kontribusi sektor ekstraktif terhadap perekonomian	Diurusutamakan sebagian, keterbatasan kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Menyajikan data tenaga kerja asing dan tenaga kerja dalam negeri (TKA/TKI) di industri ekstraktif - Menyajikan data PDB (mutlak dan relatif) - Menyajikan data produksi dari area produksi utama
6.4. Dampak lingkungan	Diurusutamakan sebagian, keterbatasan utama (dorongan)	<ul style="list-style-type: none"> - Mempublikasikan jumlah perusahaan Minyak, Gas, dan Pertambangan yang telah memperoleh izin yang diperlukan untuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

- Data pendapatan

4.1. pengungkapan pajak dan pendapatan yang komprehensif	Batasan hukum dan administratif yang signifikan	<ul style="list-style-type: none"> - Data perpajakan akan disajikan berdasarkan Kode Bidang Usaha (KLU) - Presentasi Data Nasional Bukan Pajak (PNBP) Migas - Menyajikan data PNBP Minerba hingga tingkat provinsi
4.2. penjualan saham negara	Batasan hukum dan administratif yang signifikan	<ul style="list-style-type: none"> - Data disajikan dalam bentuk hak - Pemerintah terpilah ke First Tranche Petroleum (FTP), DMO, ekuitas minyak secara nasional (nilai USD\$)
4.3. Penyediaan infrastruktur dan	Diurusutamakan sebagian, keterbatasan kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Ini harus memberikan tingkat perincian dan pemilahan yang sepadan dengan pembayaran dan aliran pendapatan lainnya di

pengaturan barter		situs web masing-masing dan pada waktu yang tepat.
4.4. pendapatan transportasi	Sepenuhnya diurusutamakan	- Pastikan bahwa pendapatan transportasi mematuhi jaminan kualitas data yang ditetapkan dalam Persyaratan 4.9
4.5. Transaksi terkait BUMN	Diurusutamakan sebagian, keterbatasan utama	<p>- BUMN meningkatkan keterbukaan data keuangan dengan format excel/csv yang dapat diunduh dan detail yang dipersyaratkan dari anak perusahaan BUMN dan joint venture.</p> <p>- Informasi yang diperlukan dari anak perusahaan akan dicantumkan dalam Audited Financial Statements (AFS) konsolidasi BUMN dan atau catatan tersendiri yang dibuat oleh BUMN yang dipublikasikan melalui website Annual Report.</p>
4.6. Pembayaran subnasional	Diurusutamakan sebagian, keterbatasan utama	<p>- Kementerian Keuangan untuk meningkatkan bagan akun standar bagi pemerintah daerah untuk memasukkan rincian yang diperlukan untuk pembayaran sub-nasional seperti yang dipersyaratkan oleh Standar EITI.</p> <p>- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mengungkapkan data pembayaran daerah dengan rincian yang dipersyaratkan seperti yang dipersyaratkan oleh Standar EITI atas nama pemerintah daerah.</p> <p>- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk memasukkan rincian pembayaran subnasional dalam</p>

		<p>mekanisme pelaporan perusahaan mereka.</p> <p>-Perusahaan untuk secara sepihak mengungkapkan pembayaran subnasional.</p>
5.2. Transfer subnasional	Diarusutamakan sebagian, keterbatasan kecil	<p>- Kementerian Keuangan mempublikasikan variabel-variabel yang digunakan dalam perhitungan rumus (nilai penerimaan negara yang dibagikan ke masing-masing daerah, transfer over/under untuk tahun pajak sebelumnya per daerah)</p>
5.3. Manajemen pendapatan dan pengeluaran	Diarusutamakan sebagian, keterbatasan kecil (dorongan)	<p>- Kementerian Keuangan mengungkapkan laporan keuangannya dalam format open data reusable.</p>
6.1. Pengeluaran sosial dan lingkungan	Diarusutamakan sebagian, keterbatasan utama	<p>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>Sektor Pertambangan</p> <p>-Menampilkan data pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (PPM) (tahunan/triwulanan) per komoditas (total pertambangan), dengan menampilkan per item biaya</p> <p>-Menampilkan data penerima PPM per ring I -II (radius terdekat dari aktivitas penambangan)</p> <p>-Menampilkan informasi penerima manfaat dari sejumlah perusahaan terpilih</p>

		<p>Sektor minyak dan gas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan data realisasi PPM (tahunan) per komoditas (total migas), dengan menampilkan 7 aspek program yang ditampilkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan - Menampilkan informasi penerima manfaat dari sejumlah perusahaan terpilih
6.2. Pengeluaran kuasi-fiskal	Diarusutamakan sebagian, keterbatasan minor.	<ul style="list-style-type: none"> - Mempublikasikan perhitungan Coal Domestic Market Obligation (DMO) dan DMO Cost Oil, untuk menghitung pengeluaran kuasi fiskal. - Menyetujui definisi pengeluaran kuasi-fiskal dan mempublikasikan pembayaran DMO yang dianggap sebagai pengeluaran kuasi-fiskal.